

BAB II

KONDISI UMAT ISLAM PADA MASA KOLONIAL BELANDA

A. Kondisi Sosial Politik Umat Islam Indonesia

Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera, kemudian Islam tersebar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur. Daerah-daerah yang paling mantap Islamnya adalah daerah-daerah yang paling penting dalam perdagangan Internasional, yakni pesisir-pesisir Sumatera di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu, dan Maluku.¹

Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara². Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-14³ yang memainkan peranan utama dalam sejarah Indonesia. Kemudian sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara.⁴ Setelah itu pada pertengahan kedua abad ke-16⁵, suatu dinasti baru yaitu Kesultanan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan

¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 14.

² Kesultanan Samodra Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2013), 99.

³ Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, 12.

⁴ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 27.

⁵ Pendiri kerajaan Mataram dan sekaligus pemimpin pertama adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati, memerintah pada 1586-1601. Dede Yusuf, "Kerajaan Mataram Islam", dalam file:///D:/universityage/mykripsi/bahandasar/Sejarah Akademik Kerajaan Mataram Islam.html (09 Desember 2012).

perisiran. Maka, pada permulaan abad ke-17 kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Pemeluk-pemeluk Islam yang pertama antara lain meliputi para pedagang, yang segera disusul oleh orang-orang kota baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah.⁶ Masa-masa kerajaan Islam tersebut menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam *Api Sejarah*, disebut masa perkembangan agama Islam, yakni masa umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan.⁷

Pada masa perkembangan ini pula, perlu diketahui adanya perpindahan dinasti-dinasti di Nusantara yang memerintah memeluk agama Islam, yakni adanya raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam sekaligus terjadi pembentukan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Tidak lagi disebut raja melainkan sultan. Raja tersebut tidak kehilangan kekuasaannya dan tetap diakui oleh mayoritas rakyatnya sebagai sultan yang sah, peristiwa ini menurut J.C. van Leur terjadi karena *political motive* (bermotivasi kekuasaan).⁸

Seperti terbentuknya Dinasti baru Mataram, yang menghadapi kenyataan bahwa dia digempur oleh kekuatan gabungan antara pangeran-pangeran Islam yang menuntut kedaulatan terhadap daerah-daerah pesisir yang kaya dan Kesultanan Banten yang Islam di Jawa Barat. Akhirnya para penguasa Mataram

⁶ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 28.

⁷ Suryanegara, *Api Sejarah*, 115.

⁸ Konversi agama memeluk agama Islam yang dilakukan oleh kalangan Boepati hingga Raja di Nusantara Indonesia, menurut W.F. Wertheim karena pengaruh rasa tidak aman dari ancaman imperialisme Katolik Portugis ataupun imperialisme Protestan Belanda atau Inggris. Ibid.

memilih menjadi Islam sebagai suatu cara terbaik untuk merealisasikan ambisi-ambisinya. Sebagai sebuah kerajaan Islam dia menaklukkan musuh-musuhnya di Indonesia dan kelak dilanjutkan dengan melawan VOC.⁹

Peristiwa lainnya adalah proses Islamisasi Dinasti Prabu Siliwangi dan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat melalui pernikahan yang menjadi sebab awal masuknya Islam di kalangan Istana Pakuan Padjadjaran. Dimulai pada masa Raden Manah Rarasa atau Pamanah Rasa, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi dari Pakuan Padjadjaran dengan gelar Prabu Dewata Wisesa.¹⁰

Melalui pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, santri dari Syekh Hasanudin atau dikenal pula sebagai Syekh Qura, menjadi sebab terjadinya Islamisasi Prabu Siliwangi dan Dinastinya. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami, dan dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra dan seorang putri. Dari putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang, yang menikah dengan Maolana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang dari wali sanga adalah cucu Prabu Siliwangi.¹¹

Harry J. Benda menyebutkan dalam *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, bahwa pada saat itu, Islam bukan saja datang untuk menetap dan menyebarkan

⁹ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 30.

¹⁰ Suryanegara, *Api Sejarah*, 148.

¹¹ Ibid.

pengaruhnya, karena ia telah mempermainkan peranan politik dan ideologis yang luar biasa pentingnya.¹²

Motif politik atau motivasi kekuasaan yang diwujudkan dengan konversi agama masuk ke Islam sebagai bukti atau pengakuan para raja saat itu bahwa Islam telah menjadi arus bawah yang kuat dan berpengaruh besar terhadap proses penyuburan tanah atau lapisan masyarakat bawah. Dampaknya membentuk pandangan para penguasa saat itu untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir imperialis barat kecuali dengan berpihak kepada agamanya rakyat, yakni Islam.¹³

Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatra. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muqhayat Syah, Aceh mulai melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya. Kemajuan Aceh pada waktu tersebut sangat terpengaruh oleh kemunduran Kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis.¹⁴

Kesultanan Aceh juga memiliki hubungan politik luar negeri yang telah menampilkan Kesultanan Aceh sebagai suatu kekuatan nyata di daerah Asia Tenggara, baik politik, ekonomi, ataupun militer.¹⁵ Hubungan politik luar negeri ini tidak hanya berlangsung pada masa Kesultanan Aceh, melainkan sebelumnya

¹² Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 31.

¹³ Suryanegara, *Api Sejarah*, 116.

¹⁴ Marwati Djoened Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 335.

¹⁵ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 119.

yakni pada masa Kesultanan Perlak dan Kesultanan Samudra/Pase sudah terjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Gujarat, India, Malaka, Persia, Arab, serta kerajaan-kerajaan di Jawa, Malaya, Cina dan lain-lain.¹⁶

Ketika mulai pecah perang antara Aceh-Belanda (1873), sebuah surat kabar yang terbit di Istanbul menceritakan, bahwa dalam tahun 1516 Sultan Aceh Firman Syah telah menghubungi Siman Pasya Wazir dari Sultan Selim I Turki untuk mengikat tali persahabatan. Permintaan Aceh disetujui oleh Turki dan semenjak itu hubungan keduanya telah dimulai.¹⁷

Apalagi setelah Sultan Ali Alauddin Mansur Syah (1838-1870) mengadakan kontak niaga dengan Kerajaan Katolik Perancis, di bawah Napoleon III pada 1852 M. Hal ini diikuti dengan meningkatkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki pada 1869 M. Dilanjutkan dengan upaya peningkatan hubungan diplomatik pada masa Sultan Mahmud Syah (1870-1874) antara Kesultanan Aceh dengan Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Republik Perancis di bawah Presiden Thiers.¹⁸

Jika keadaan Aceh pada abad ke-16 merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh, Demak juga merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pantai Utara Pulau Jawa pada abad ke-15. Dapat dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-16 Demak telah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Bagian pedalaman dari Kerajaan Majapahit hampir semua telah menjadi

¹⁶ Ibid., 120.

¹⁷ Ibid., 121.

¹⁸ Suryanegara, *Api Sejarah*, 259.

daerah taklukannya, sedangkan di bagian Barat sebagian daerah Pajajaran telah menjadi daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Selain itu, Demak juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan Malaka. Akan tetapi hubungan itu mulai terganggu sejak Malaka dikuasai oleh Portugis.¹⁹

Setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka, 1511 M, sebagai pusat niaga Islam dari tangan kekuasaan Sultan Mahmud, timbullah kekacauan sistem niaga secara damai berubah menjadi sistem perampokan. Kerajaan Katolik Portugis tidak memiliki komoditi yang dapat dibarterkan di Malaka. Umat Islam merasa tertindas sehingga memindahkan pusat niaganya ke Brunei.²⁰

Selain itu, imperialis Portugis juga mengharapkan hubungan niaga rempah-rempah antara Nusantara dengan Kesultanan Turki terputus. Dampaknya diharapkan keruntuhan Kesultanan Turki. Dari kondisi itulah, Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenjata merebut kembali Malaka, 1512 M, demikian juga Kesultanan Aceh. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan.²¹

Memasuki abad ke-17 M, umat Islam di Indonesia dihadapkan serbuan banyak negara imperialis Barat. Kedua kekuatan imperialis Katolik Portugis dan Spanyol belum berhasil terpatahkan, datang gelombang baru imperialis Protestan Belanda dengan lembaga dagangnya VOC, dan Inggris dengan lembaga dagangnya EIC (*The East India Company*—Maskapai Hindia Timur Inggris—).²²

¹⁹ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 338.

²⁰ Suryanegara, *Api Sejarah*, 158.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 162.

Pada tahun-tahun pertama setelah pembentukan VOC hubungan antara mereka dengan penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara boleh dikatakan dengan baik karena orang-orang VOC sendiri sedang menghadapi saingan dari orang-orang Portugis. Sebaliknya, beberapa kerajaan Islam waktu itu sedang melakukan reaksi bahkan ada di antaranya telah mengadakan beberapa perlawanan terhadap penetrasi politik Portugis.²³

Pada tahun-tahun setelah J.P. Coen menjadi Gubernur Jenderal VOC, arah politiknya jelas bukan hanya untuk perdagangan biasa, melainkan untuk melaksanakan monopoli perdagangan serta politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, sehingga muncullah reaksi-reaksi yang besar bahkan sampai terjadi perang.²⁴

Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 M yang melancarkan perlawanan bersenjata, antara lain adalah:

Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan Jayakarta, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ambon, Kesultanan Bacan, Kesultanan Djailolo, Kesultanan Goa, Kesultanan Broenei terhadap imperialis Barat: Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 M.

Kemudian dilanjutkan oleh:

Kesultanan Mataram dan Tatar Oekoer, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa, Kesultanan Makasar dan Kesultanan Aceh terhadap imperialis Kerajaan Protestan Belanda dan Kerajaan Protestan Anglikan Inggris pada abad ke-17 M.²⁵

²³ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 350.

²⁴ *Ibid.*, 351.

²⁵ Suryanegara, *Api Sejarah*, 140.

Perlawanan atau pemberontakan tersebut pada abad-abad berikutnya di berbagai daerah pada umumnya, merupakan perlawanan terhadap penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara.²⁶

B. Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam Indonesia

Pada umumnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dapat dikatakan sebagai kerajaan Maritim, karena pusat-pusat kekuasaannya berada di kota-kota pelabuhan. Pusat-pusat kekuasaan di kota-kota pelabuhan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ekonomi Kesultanan, karena ia juga berfungsi sebagai pasar.²⁷

Penghasilan pasar adalah salah satu sumber penghasilan bagi Sultan atau penguasa setempat. Segala transaksi berada di dalam kekuasaan Sultan, walaupun dalam prakteknya kekuasaan itu didelegasikan kepada pejabat pelabuhan, seperti syahbandar atau pejabat lain yang ditunjuk Sultan. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap transaksi itu, Sultan berhak memungut berbagai pajak dan cukai untuk segala macam barang.²⁸

Seperti di pelabuhan Malaka, ada kapal-kapal Malaka yang menjadi milik penuh dari Sultan, dan dalam hal ini perdagangan dijalankan oleh seorang saudagar yang bertindak atas nama Sultan. Menurut Pires, pada setiap jung yang

²⁶ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 351.

²⁷ Taufik Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), 112.

²⁸ *Ibid.*, 113.

berangkat dari Malaka ada sebagian barang dagangan milik Sultan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini tidak sedikit, apalagi Sultan mendapat prioritas dalam pembagian ruang (petak) untuk barang dagangannya.²⁹

Dari usaha perdagangan ini, Sultan dapat mengumpulkan harta yang besar. Dengan penghasilan dari bea cukai yang dipungut dari barang impor ditambah dengan pajak lainnya, kekayaan Sultan bertambah dengan semakin ramainya kapal-kapal dan saudagar-saudagar yang mengunjungi bandar. Sultan Alauddin Syah dikatakan mempunyai harta yang ditaksir sama dengan 140 kuintal emas (8824 kg). Mansyur Syah, menurut perkiraan Pires, memiliki 120 kuintal emas ditambah dengan sejumlah besar intan berlian dan ratna-mutu-manikam.³⁰

Berdasarkan keterangan Willem Lodewijk, salah seorang anggota kongsi dagang Belanda yang ikut dalam rombongan Cornelis de Houtman ke Pelabuhan Banten pada tahun 1596, di kota Banten terdapat beberapa pasar, yakni pasar Karangantu, Pabean, dan Pacinan. Di Pasar Karangantu yang dekat pelabuhan, terdapat berbagai bangsa yang berdagang. Para pedagang itu berasal dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Keling, Pegu (Burma), Malaya, Bengal, Gujarat, Malabar, Abesinia, dan dari berbagai tempat lainnya di Nusantara seperti Madura, Bugis, dan sebagainya. Pasar Pabean adalah pasar yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari. Pasar ini terbuka dan tetap ramai dari pagi

²⁹ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 121.

³⁰ Ibid.

sampai malam hari. Pasar yang ketiga Pacinan merupakan pasar temporer yang tidak setiap hari ada kegiatan perdagangan.³¹

Menurut keterangan John Davis, yang berkunjung ke Banda Aceh di abad 17, di sana terdapat tiga buah pasar untuk kegiatan transaksi dan jual beli segala macam barang dagangan, yang dilakukan oleh berbagai bangsa. Peter Mundi mencatat dengan rinci jenis-jenis barang diperdagangkan di sana, antara lain terdapat telur penyu.³² Barang-barang dagangan yang dijual di pasar kota-kota besar dapat digolongkan atas dua jenis, yakni hasil produksi dalam negeri dan impor.

Pasar tidak hanya terdapat di kota-kota, tetapi juga di berbagai tempat di desa-desa. Adanya pasar di dalam kota-kota pusat kerajaan maupun kota-kota yang bukan pusat kerajaan, sangatlah erat hubungannya dengan sifat corak kehidupan ekonomi kota itu sendiri.³³ Kota-kota pusat kesultanan dan kota-kota pelabuhan, seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten, Gresik, Jaratan, Japara, Surabaya, Ternate, Banda, Gowa-Makassar, Banjarmasin, dan Palembang banyak dikunjungi pedagang-pedagang besar-kecil dari berbagai negeri asing dan juga dari berbagai kerajaan di Indonesia.³⁴

Hingga permulaan abad 17 di berbagai daerah Nusantara yang telah dikuasai kerajaan-kerajaan Islam masih terdapat sistem jual beli barter atau

³¹ Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 113.

³² Ibid., 114.

³³ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 303.

³⁴ Ibid., 304.

tukar-menukar tanpa alat pembayaran uang. Sistem barter biasanya dilakukan oleh pedagang pesisir dengan pedagang pedalaman, juga antara pedagang kota dengan petani. Tetapi beberapa kerajaan lain pada abad 15 dan 16 pun sudah ada yang memakai mata uang untuk alat pembayaran baik dengan menggunakan mata uang setempat ataupun mata uang asing.³⁵ Penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran telah dilaksanakan secara luas dalam fase pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam.

Pasar dalam perkampungan pedagang-pedagang asing maupun di pusat kota atau di bagian lain dari kota, tidaklah lepas dari kepentingan ekonomi masyarakat kota. Hubungan kota dan desa di sekitarnya juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian karena saling bergantung. Golongan petani yang menjual surplus hasil buminya kepada golongan pedagang merupakan faktor yang penting pula dalam kehidupan perekonomian, dan pasar adalah tempat pertukaran barang-barang yang mereka masing-masing perlukan.³⁶

Pada akhir abad 16 dan di awal abad 17 para pedagang Eropa turut meramaikan kegiatan pasar di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pedagang Eropa yang paling awal datang di kawasan Nusantara adalah Portugis, disusul orang-orang Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda.³⁷

Kedatangan Inggris dan Belanda ke Nusantara tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, VOC (dari Kerajaan Protestan Belanda) dan EIC (dari

³⁵ Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 115.

³⁶ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 304.

³⁷ Abdullah et.al., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, 115.

Kerajaan Protestan Anglikan Inggris), namun juga berusaha keras untuk memajukan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan.³⁸

Terutama dengan adanya upaya Barat untuk mempertahankan penjajahannya, dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Pemerintah kolonial Belanda dengan cara menyebarkan “ajaran Islam” dengan melalui hadits yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya secara perlahan-perlahan, patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi.³⁹

Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Bangsa Timur Asing: Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial, kalangan Bangsa Timur Asing tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas dua. Dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas tiga. Pasarnya disita, serta kekuasaan ekonominya dipatahkan, pribumi Islam menjadi sangat terbelakang.⁴⁰

Tujuan kolonial Belanda tersebut melalui kongsi dagangnya, VOC, dengan sendirinya membangkitkan perlawanan pedagang pribumi yang merasa langsung

³⁸ Suryanegara, *Api Sejarah*, 5.

³⁹ *Ibid.*, 7.

⁴⁰ *Ibid.*

terancam kepentingannya. Sikap bermusuhan bertambah kuat karena kehadiran Belanda mendorong umat Islam lebih memperkokoh persatuan untuk menghadapinya. Terlebih lagi sistem monopoli perdagangan bertentangan dengan sistem tradisional yang telah berlaku.⁴¹

C. Kondisi Pendidikan Umat Islam Indonesia

Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya kekuasaan politik Islam di luar Indonesia. Timbulnya kekuasaan politik Islam yang dibangun oleh Kaisar Dinasti Gengis Khan besar pengaruhnya terhadap Nusantara Indonesia, yang mendorong meluasnya kekuasaan politik Islam dan pertumbuhan Masjid, pesantren serta pasar di dalam dan luar Pulau Jawa.⁴²

Fungsi pesantren pada saat itu tidak hanya sebagai arena melahirkan ulama. Namun, pesantren juga sebagai kancha pembinaan pemimpin bangsa. Para putra Soeltan dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku pada umumnya, dipesantrenkan kepada Waliullah Soenan Ampel Surabaya dan Soenan Giri di Gresik. Oleh karena itu, tidak heran jika kehadiran pesantren dengan santri yang datang dari berbagai suku dan etnis, tetapi menghilangkan pandangan yang etnosentrisme, menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme.⁴³

⁴¹ Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru I*, 71.

⁴² Suryanegara, *Api Sejarah*, 140.

⁴³ *Ibid.*, 138.

Dari survei Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang diadakan pada tahun 1819 terkesan bahwa pesantren sebenarnya belum ada pada waktu itu di seluruh Jawa. Lembaga-lembaga pendidikan yang mirip pesantren dilaporkan terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Di daerah lain tidak terdapat pendidikan resmi sama sekali, kecuali pendidikan informal yang diberikan di rumah-rumah pribadi dan masjid.⁴⁴

Pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren Tegalsari, di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Sultan Paku Buwono II pada tahun 1742 sebagai tanda terima kasih kepada Kyai Hasan Besari. Paku Buwono II juga membangun masjid dan asrama untuk santri.⁴⁵

Sungguhpun tidak ada bukti yang jelas adanya pesantren sebelum berdirinya pesantren Tegalsari, tidak berarti tidak ada santri yang tinggal sekian lama di tempat guru untuk memperdalam agama Islam waktu itu. Zainal Abidin, raja Ternate pertama yang beragama Islam dikabarkan belajar agama Islam di Giri, mungkin dengan Prabu Satmata, yang disebut sebagai raja-ulama pertama di Giri.⁴⁶

Dalam *Serat Centhini* juga diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Danadarma. Ia mengaku telah belajar selama tiga tahun di Karang, Banten, yang letaknya mungkin di sekitar Gunung Karang, sebelah barat

⁴⁴ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 193.

⁴⁵ *Ibid.*, 194.

⁴⁶ *Ibid.*

Pandeglang di bawah pimpinan Seh Kadir Jalena; mungkin maksudnya dia belajar ilmu yang dikaitkan dengan Sufi besar ‘Abd al-Qadir Jailani.⁴⁷

Selain itu, sejak dibukanya terusan Suez pada 1869, setiap tahun ribuan kaum muslimin Indonesia menunaikan ibadah haji ke Makkah. Tidak sedikit dari mereka itu yang membawa ajaran ortodoks setelah naik haji atau sekian lama bermukim di tanah suci.⁴⁸ Dan semakin penting lagi di Indonesia, sebagaimana di mana-mana di dunia Islam, penganjur-penganjur Islam yang ortodoks cenderung untuk berbenturan dengan para penguasa sekuler.⁴⁹

Salah satu tokoh juga dalam *Serat Centini*, Jayengresmi alias Amongraga, belajar di *paguron* (perguruan) Karang, di bawah bimbingan seorang guru Arab bernama Syaikh Ibrahim bin Abu Bakar, yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Karang. Dari Karang, kemudian dia pergi ke *paguron* besar lain di Desa Jawa Timur, Wanamarta, yang dipimpin oleh Ki Baji Panutra, di mana dia menunjukkan penguasaannya yang sangat mendalam atas kitab-kitab ortodoks.⁵⁰

Adapun pada masa kesultanan Aceh telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.⁵¹ Sudah semenjak berabad-abad yang lampau sebelum kesultanan Aceh, Aceh sudah tidak mengenal lagi buta huruf, seperti yang diakui orang Perancis, Beaulieu, yang pernah berkunjung ke Aceh di abad ke-17. Sultan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 3.

⁴⁹ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 33.

⁵⁰ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 194.

⁵¹ Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, 192.

Iskandar Muda mempunyai minat yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga untuk itu banyaklah dayah-dayah (pesantren-pesantren) yang didirikannya.⁵²

Sejak kedatangan para imperialis dengan tujuan yang ingin membumihanguskan ajaran Islam dan diganti dengan agama para imperialis, para ulama mulai mendidik dan merekrut para santri dan masyarakat untuk memiliki moral dan semangat berjihad membela agama, bangsa dan negara.

Penjajah Barat mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Untuk kepentingan ini, penjajah Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya nista, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh ulama.⁵³

Dari berbagai kebijakan politik penjajah, dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh. Dengan target hilangnya kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap penjajah karena kebodohnya menjadikan penderitanya, tidak menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohnya sebagai produk strategi penjajah.⁵⁴

Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan fasilitas pendidikan untuk kalangan anak bangsawan dan anak raja serta anak Eropa. Tidak lupa diberikan

⁵² Ibid., 192.

⁵³ Suryanegara, *Api Sejarah*, 139.

⁵⁴ Ibid.

fasilitas diskriminatif untuk Cina dan Ambon. Pesantren dijadikan target serangannya, *ruthless operation* (operasi yang tidak kenal belas kasih). Kiai atau ulamanya digantung. Bangunan dan sarana pendidikan lainnya dibakar atau dirusakkan. Santri-santrinya ditangkap dan dibuang jauh dari wilayah aslinya.⁵⁵

Sedangkan kiai ortodoks yang terlatih di Makkah membangun pesantren yang semakin menarik siswa-siswanya dalam jumlah besar. Malah jauh lebih penting dari itu, gelombang ortodoksi terbaru mengubah setiap pesantren, sekurang-kurangnya secara potensial menjadi pusat sentimen anti-Belanda.⁵⁶

Latar belakang sejarah ini menjadikan pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, menjadi sentra pembangkit kesadaran nasional dan ulama sebagai pemimpinnya, mengajarkan kepada santri dan masyarakat pendukungnya tentang perlunya mempertahankan tanah air, menyelamatkan bangsa, dan merebut kembali kemerdekaan, terutama berjuang menegakkan agama dan hukum Islam di seluruh Nusantara Indonesia agar terbebas dari penindasan Kristenisasi dari imperialisme Katolik atau imperialisme Protestan yang akan menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat.⁵⁷

Prahara imperialis Barat ini dijawab umat Islam Indonesia sesuai dengan tantangannya. Dijawab oleh Ulama dan Santri dengan masyarakat pesantrennya, bersama para Sultan dengan kekuasaan politik Islam. Kerjasama tersebut

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 37.

⁵⁷ Suryanegara, *Api Sejarah*, 139.

melancarkan perlawanan bersenjata di darat dan di laut. Walaupun menggunakan senjata yang tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh imperialis Barat.⁵⁸

Ancaman yang lebih besar lagi adalah pemberontakan-pemberontakan yang sungguh-sungguh dan tersebar luas, kebanyakan dilancarkan sebagai “Perang Sabil” atas nama Islam, selama abad ke-19, yang menyaksikan proses konsolidasi pemerintahan Belanda di Jawa dan Sumatra. Demikianlah yang terjadi dalam perang Banten di pertengahan abad ke-18, yang disebut perang Cirebon (1802-1806) melawan Belanda di bawah panji Islam. Di Sumatra, orang-orang Belanda turut campur di dalam perang Padri (1821-1838) di pihak kepala-kepala adat Minangkabau melawan para ulama yang perkasa.⁵⁹

Setidaknya ada tiga kali peperangan besar lainnya yang melibatkan para Ulama dan santri serta para Sultan dengan kekuasaan politiknya, seperti perang Makassar (1660-1669), perang Diponegoro (1825- 1830), dan perang Aceh (1873-1912) yang merupakan perang santri terlama sehingga Belanda menghadapi peperangan tersebut sampai akhir kekuasaannya⁶⁰.

Belanda memperoleh kesulitan yang sangat besar dengan Islam di Kesultanan Aceh di Sumatra; untuk jangka waktu panjang Aceh merupakan daerah ortodoks Islam di wilayah Indonesia yang paling tegar, di mana perang yang ganas dan berkepanjangan berlangsung antara tahun 1873 sampai 1912.⁶¹ Pemerintah Belanda

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 38.

⁶⁰ Suryanegara, *Api Sejarah*, 266.

⁶¹ Ibid.

pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama.⁶²

Kemudian seiring perjalanan waktu para ulama menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan berhasil kalau melanjutkan cara-cara tradisional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial sendiri, yaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan ataupun di bidang pergerakan politik.

Hingga pada pertengahan abad ke-19, Ummat Muslim di wilayah Indonesia dan Melayu belum merupakan bagian dari kesatuan imperium dan budaya, melainkan mereka terbagi dalam berbagai etnik dan bahasa, dan sejumlah negara. Baru pada akhir abad ke-19 dominasi Belanda dan Inggris mengantarkan pada transformasi besar-besaran dalam kehidupan politik dan ekonomi, dan memancing reaksi kelompok nasionalis dan Muslim untuk menentang campur tangan bangsa asing. Ulama tradisional dan guru-guru Sufi, mantan elite politik, kelompok administrator dan intelektual baru Indonesia, reformer Muslim, dan para pemuka militer radikal bangkit untuk menuntut masa depan masyarakat Indonesia dan Melayu. Gerakan nasionalis sekuler, komunis, tradisional Islam, dan gerakan reformis Islam bangkit menentang pemerintahan kolonial, dalam pergolakan untuk merumuskan bentuk masyarakat Indonesia-Melayu abad ke-20.⁶³

⁶² Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 3.

⁶³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bag.3*. Terj. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 309.